

Partisipasi Politik Umat Islam dalam Aksi Massa 212 dan Implikasinya terhadap Wajah Islam Indonesia

Ali Thaufan Dwi Saputra

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
alitopands@gmail.com

Dedi Sutiadi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
dedisutiadi22@gmail.com

Abstract: *This article is based on premises that mass actions are something common in a democratic country. Mass actions such as defending Islam actions (The 212 rally) “Aksi Bela Islam 212” are one of the form public political participation. If likened to an organ in body, the public political participation takes the most vital one. The 212 rally that took place at the end of 2016 have formed new alliances which often take action by labelling themselves as the 212 rally. This series of mass actions had given an impact to the state (especially in terms of ideological and practical politics) and religious life. This article shows that the post mass of the 212 rally has opened up opportunities for the bearers of the idea sharia Indonesia and khilafah concept to step forward and showing their existence –although in terms of quantity they are a minority. In relation to practical politics, alliances which are member of the alumni 212 brotherhood have determined political elections for certain presidential candidates and political parties in 2019 elections. As for religious life, the 212 rally post mass has caused tension due to differences in attitudes towards political action and choices. Viewed from public political participation perspective, the 212 rally in 2nd December 2016 contributed to government policy in the blasphemy case by Basuki Tjahaja Purnama.*

Keywords: *Participation, Blasphemy, Religion, Indonesia*

Abstrak: *Artikel ini ditulis berlatar dari premis bahwa aksi massa adalah sesuatu yang wajar di dalam negara demokrasi. Aksi massa seperti aksi bela Islam 212 merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat. Ibarat organ tubuh, partisipasi politik masyarakat adalah organ paling vital. Aksi massa 212 yang terjadi di penghujung 2016 kemudian membentuk sebuah aliansi baru dan kerap melakukan aksi-aksi dengan melabeli diri sebagai alumni 212. Deretan aksi massa memberikan dampak dalam kehidupan kenegaraan (terutama politik ideologis maupun praktis) dan keagamaan. Artikel ini menunjukkan bahwa aliansi pasca aksi massa 212 membuka kesempatan pengusung gagasan Indonesia bersyariah dan penegakan sistem khilafah untuk tampil dan menunjukkan eksistensi mereka –meski bisa dibbilang secara kuantitas adalah minoritas. Dalam kaitannya dengan politik praktis, aliansi yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 menentukan pilihan politik terhadap capres 2019 dan partai politik tertentu. Adapun dalam kehidupan keagamaan, pasca aksi massa 212, terjadi ketegangan akibat perbedaan sikap terhadap aksi dan pilihan politik. Ditinjau dari perspektif partisipasi politik masyarakat, aksi massa 212 pada 2 Desember 2016 turut serta memengaruhi kebijakan pemerintah terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.*

Kata Kunci: *Partisipasi, Penistaan, Agama, Indonesia*

Pendahuluan

Aksi massa yang terjadi pada 2 Desember 2016 di Jakarta tercatat sebagai aksi massa terbesar dan bersejarah dibanding aksi serupa di Monas.¹ Peserta aksi kemudian menamakan diri dengan “212”, merujuk pada tanggal dilaksanakannya aksi tersebut. Jutaan umat Islam turun memadati jalanan menuntut penegakan hukum terhadap Gubernur Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama yang diduga telah menistakan agama Islam. Aksi massa ini dikemudian hari memupuk solidaritas baru Muslim Indonesia dan dalam perkembangannya menjelma sebagai aliansi massa yang turut serta berpartisipasi dalam politik praktis, Pemilihan Umum (Pemilu).

Artikel ini berangkat dari premis bahwa partisipasi politik –dalam yang ini yang dilakukan umat Islam- tidak hanya sekedar pemberian suara pada saat Pemilu. Lebih dari itu, partisipasi politik masyarakat sebagaimana yang didefinisikan para pakar adalah upaya memengaruhi kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, baik dalam bentuk tertutup seperti lobi, negosiasi; maupun dalam bentuk terbuka seperti aksi demonstrasi.² Bahkan lebih jauh lagi, ada pula yang memasukkan aksi huru-hara hingga teror sebagai bagian dari partisipasi politik.³

Di negara penganut sistem demokrasi, konsepsi mengenai partisipasi politik masyarakat berangkat dari anggapan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat mendapat posisi yang penting dalam menentukan kebijakan, juga menentukan pemimpin melalui sistem Pemilu. Dengan konsepsi tersebut, maka partisipasi politik masyarakat memberikan legitimasi berjalannya suatu pemerintahan atau negara.⁴ Maju tidaknya demokrasi suatu negara juga sangat ditentukan seberapa besar partisipasi politik masyarakatnya. Itulah sebabnya, partisipasi politik mendapat tempat yang sangat penting dalam negara demokrasi.⁵

Artikel ini mengulas latar belakang munculnya aksi massa 212 yang digelar pada 2 Desember 2016 serta aksi-aksi massa setelahnya yang membawa atribut 212. Oleh karena itu, penulis membuat “definisi operasional” bahwa yang dimaksud aksi massa 212 adalah aksi massa yang dilakukan sebelum 2 Desember 2016 dan sesudahnya. Melalui pembacaan terhadap latar historis aksi tersebut, artikel ini juga mengulas dampak dari aksi. Sebelum mengulas dua pembahasan utama tersebut, terlebih dahulu penulis memaparkan “sekilas” partisipasi politik yang dilakukan umat Islam, dengan mengambil model dari dua organisasi massa Islam arus

¹ Dibanding dengan aksi atau perhelatan massa sebelumnya di Monas, aksi massa 212 jauh lebih banyak mendatangkan massa. Jika dibanding aksi massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan berkeyakinan (AKK-BB) pada 2008 dan aksi demo buruh di silang Monas pada 2015 yang diperkirakan diikuti ribuan orang saja, tentu aksi 212 jauh lebih banyak mendatangkan massa. Lihat dalam: “FPI serang Aliansi Kebangsaan”, http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/06/080601_jakartaclash.shtml, dan “Demo buruh, kawasan Monas macet”, <https://regional.kontan.co.id/news/demo-buruh-kawasan-monas-macet>, diakses pada 20/1/2020, pukul 11.55 wib

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 369. Lihat juga dalam: Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 140.

³ Pendapat ini misalnya dikemukakan Huntington dan Joan. Samuel Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 13.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 368.

⁵ Sidi Ritaudin, *Benturan Politik: Antara Idealisme dan Pragmatisme* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, tt), 31.

utama di Indonesia: Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik *Civil Islam* di Indonesia

Samuel Huntington dan Joan Nelson membuat kalimat awal yang menggugah dalam bab pendahuluan bukunya yang berjudul *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Ia menulis: “Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik”.⁶ Apa yang dinyatakan Samuel dan Joan itu menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat adalah keniscayaan dalam sebuah negara demokrasi. Tidak ada negara demokrasi tanpa partisipasi masyarakat. Negara yang mengklaim sebagai paling demokratis, tetapi menafikan partisipasi masyarakatnya, maka itu sama artinya dengan otoritarianisme.

Di negara penganut sistem demokrasi, konsepsi mengenai partisipasi politik masyarakat berangkat dari anggapan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat mendapat posisi yang penting dalam menentukan kebijakan, juga menentukan pemimpin melalui sistem Pemilu. Dengan konsepsi tersebut, maka partisipasi politik masyarakat memberikan legitimasi berjalannya suatu pemerintahan atau negara.⁷ Maju tidaknya demokrasi suatu negara juga sangat ditentukan seberapa besar partisipasi politik masyarakatnya. Itulah sebabnya, partisipasi politik mendapat tempat yang sangat penting dalam negara demokrasi.⁸

Samuel dan Joan, mendefinisikan partisipasi politik masyarakat sebagai

keterlibatan masyarakat dalam memengaruhi kebijakan pemerintah. Definisi ini tidak berbeda jauh dengan pemikir politik lainnya. Namun, ia juga melebarkan makna partisipasi politik masyarakat tidak sebatas tersebut di atas. Lebih jauh, keduanya berpendapat bahwa partisipasi politik masyarakat dapat berbentuk aksi massa, demonstrasi, pemogokan massa, bahkan pemberontakan dan teror sekalipun. Oleh karenanya, keduanya berpandangan bahwa partisipasi politik bisa dilakukan dengan cara yang legal maupun ilegal.⁹ Sementara itu, Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan masyarakat dalam Pemilu maupun keterlibatan dalam memengaruhi kebijakan yang akan diputuskan pemerintah. Dengan ungkapan lain, partisipasi politik adalah kesadaran masyarakat untuk berpolitik meski politik tidak selalu terjun pada partai politik tertentu.¹⁰ Sedangkan Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik sebagai “keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya”.¹¹

Ramlan membagi beberapa “rambu-rambu” dalam partisipasi politik masyarakat. *Pertama*, partisipasi politik yang dilakukan baik individu maupun kelompok merupakan kegiatan yang dapat dilihat, atau bukan sesuatu sikap maupun orientasi partisipan. *Kedua*, partisipasi politik dimaksudkan untuk memengaruhi kebijakan yang telah dijalankan maupun akan dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, partisipasi juga bisa berupa memengaruhi keputusan pemerintah. *Ketiga*,

⁶ Samuel Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 1.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 368.

⁸ Sidi Ritaudin, *Benturan Politik: Antara Idealisme dan Pragmatisme* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, tt), 31.

⁹ Samuel Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, 8.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 367.

¹¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 140.

kegiatan partisipasi bisa dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Misalnya kegiatan langsung adalah partisipan menyampaikan aspirasinya kepada eksekutif maupun legislatif. Sementara partisipasi dalam bentuk tidak langsung seperti menyampaikan aspirasi kepada eksekutif dan legislatif melalui pihak yang lebih dipercaya, misalnya melalui ormas maupun organisasi profesi dan jenis kelompok lainnya.

Selanjutnya, *keempat* yang termasuk dalam rambu-rambu partisipasi politik adalah bahwa kegiatan partisipasi dilakukan secara wajar (Ramlan menggunakan istilah konvensional) maupun kekerasan (*violence*). Partisipasi dalam bentuk konvensional seperti keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu, masyarakat yang mengajukan surat petisi, audiensi dengan pejabat eksekutif-legislatif, hingga seseorang yang menulis surat untuk presiden. Sedangkan partisipasi dalam bentuk kekerasan adalah seperti demonstrasi, pemogokan, aksi kelompok bersenjata, hingga aksi kudeta. Menurut Ramlan, di negara-negara yang sudah maju demokrasinya, sangat jarang partisipasi politik dilakukan dalam bentuk kekerasan.¹²

Sedangkan ditinjau dari aktor yang melakukan partisipasi, Ramlan membagi menjadi dua. Pertama, partisipasi individu, yaitu seseorang yang menulis surat kepada pemerintah atau pengambil kebijakan lainnya. Kedua, partisipasi kolektif, yaitu berupa kerumunan massa yang bergerak serentak menyampaikan tuntutan mereka. Partisipasi secara kolektif juga dibagi dalam dua bentuk. Pertama kolektif konvensional, di mana para partisipan menyampaikan partisipasinya secara formal melalui Pemilu atau Pilkada. Kedua, partisipasi non konvensional seperti

demonstrasi, pemogokan dan huru-hara. Pada umumnya, pelaku partisipasi non konvensional dilakukan oleh orang-orang oposisi pemerintah dan anti rezim yang berkuasa.¹³

Miriam Budiarjo membagi jenis kelompok partisipan menjadi lima kelompok. *Pertama*, kelompok Anomi. Kelompok ini memang tidak memiliki manajemen organisasi dalam arti formal. Akan tetapi anggota kelompok ini mempunyai kesamaan rasa: rasa frustrasi dan kekecewaan. Meski tidak memiliki manajemen organisasi, kelompok ini mampu melakukan aksi massa dalam jumlah besar, seperti demonstrasi dan pemogokan. Miriam mencontohkan kelompok ini sebagaimana yang telah terjadi di Denmark pada 2006 ketika muncul kartun Nabi Muhammad.

Kedua kelompok Non-Asosiasional. Kelompok jenis ini biasanya tumbuh membentuk diri atas dasar kesamaan tertentu misalnya, suku, etnis, agama, profesi pekerjaan. Pada umumnya, anggota kelompok ini tidak begitu aktif dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. *Ketiga*, kelompok Institusional. Kelompok ini merupakan kelompok organisasi formal yang menjalin hubungan kerja sama dengan pemerintah. Mereka secara aktif terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan politik. Contoh kelompok ini adalah Darma Wanita. *Keempat*, kelompok Asosiasional. Kelompok ini merupakan kelompok yang secara khusus menyampaikan keinginan dan aspirasi mereka kepada pemerintah. Contoh dari kelompok ini adalah: federasi serikat buruh, ikatan dokter, komunitas petani dan lain-lain. *Kelima*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM merupakan wadah bagi masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap organisasi. Di Indonesia, terdapat berbagai macam LSM yang mengusung bidang-bidang

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 141-142.

¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 143.

tertentu seperti, pelayanan publik, agama, politik, kepemiluan, lingkungan dan lain-lain.¹⁴

Dalam konteks sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintah, kajian Samuel dan Joan menyebutkan bahwa elit politik yang tidak memegang kekuasaan sangat mungkin melakukan mobilisasi massa dan mendorong mereka lebih aktif melakukan partisipasi politik. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi kekuasaan rezim yang berkuasa, menjadi kontrol pemerintah, hingga merebut kekuasaan.¹⁵

Dalam kerangka dasar teori partisipasi politik PA 212 lebih dekat dengan makna partisipasi politik seperti yang disampaikan oleh Samuel Huntington dan Joan Nelson yang memiliki arti lebih luas tentang partisipasi politik tidak hanya terbatas pada Pemilihan Umum. Samuel dan Joan menjelaskan partisipasi politik masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam memengaruhi kebijakan pemerintah dengan bentuk aksi masa atau demonstrasi seperti yang dilakukan PA 212.

Sebagai sebuah kegiatan masyarakat dalam kerangka teori Ramlan, Aksi massa 212 tidak termasuk dalam kategori aktif maupun pasif dalam merespons kebijakan pemerintah. Hal ini dikarenakan lahirnya aksi massa 212 sama sekali tidak ada kaitannya dengan merespons atau mengkritisi kebijakan pemerintah. Aksi massa 212 lebih bersifat reaktif terhadap sikap personal yang dinilai telah berbuat tidak elok sebagai person maupun pemimpin sebuah lembaga yang sikapnya tersebut meresahkan sejumlah masyarakat tertentu. Jika dilihat dari jenisnya partisipasi

politik masyarakat dalam konteks aksi massa 212 termasuk dalam kelompok jenis “Anomi”. Mereka berangkat membentuk sebuah komunitas baru atas dasar kesamaan rasa kecewa terhadap pernyataan Basuki, Gubernur Jakarta saat itu yang dianggap menistakan agama Islam.

Nurcholish Madjid mengungkapkan bahwa partisipasi politik masyarakat (umat) dalam menentukan pilihan politik telah dipraktikkan di era *Khulafa al-Rasyidin*. Ia menukil pendapat Robert N. Bellah yang menyebut bahwa partisipasi umat Islam saat itu mencerminkan mereka sudah lebih “modern” dalam berdemokrasi dengan melibatkan masyarakat. Menurut Bellah seperti yang dikutip Nurcholish, partisipasi masyarakat Islam pada masa klasik sudah terjadi dan berproses dengan sangat terbuka. Pada proses pemilihan pemimpin umat, dari sisi calon pemimpin sebagai objek yang akan dipilih tidak lagi dinilai dari suku atau golongan tertentu tapi berdasarkan kelayakan dan kapabilitasnya.¹⁶

Setelah kekuasaan Islam beralih ke sistem kekhilafahan Bani Umayyah, partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan telah dihapuskan karena menerapkan sistem monarki. Abdul Jamil menyebut khilafah pertama Umayyah, Muawiyah, telah merubah sistem “republik” yang telah diterapkan pada masa *Khulafa al-Rasyidin* menjadi sistem monarki (kerajaan).¹⁷ Sistem kekhilafahan ini yang barangkali dalam perkembangan sejarah Islam membuat banyak kalangan meragukan spirit demokrasi Islam. Mereka cenderung memandang Islam dan

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 387.

¹⁵ Samuel Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, 226.

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Dian Rakyat, 2008), 553.

¹⁷ Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), 150.

demokrasi (termasuk di dalamnya juga partisipasi masyarakat) sebagai sesuatu yang utopis. Dengan ungkapan lain, Islam tidak sejalan dan tidak kompatibel dengan demokrasi. Pandangan ini misalnya diungkapkan Samuel Huntington yang menanggapi “partisipasi masyarakat adalah hal yang asing bagi Islam”. Namun, pendapat Samuel itu banyak dibantah peneliti selanjutnya. Saiful Mujani misalnya, dalam risetnya ia berkesimpulan bahwa adanya ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah dan peranannya dalam kehidupan bernegara merupakan bukti bahwa Islam dan partisipasi politik saling mendukung. Saiful menyebut bahwa tidak ada korelasi negatif antara Islam dengan partisipasi politik.¹⁸

Salah satu *indonesianis*, Robert William Hefner dalam bukunya *Civil Islam* mengungkap bahwa masyarakat sipil Islam sangat berperan dalam upaya mewujudkan demokratisasi di Indonesia. Hasil riset Hefner merupakan karya penting yang memotret partisipasi ormas Islam dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Meski demikian, Hefner juga memperkirakan munculnya benih-benih paham yang merusak tradisi Muslim demokratik Indonesia. Kemunculannya itu terjadi mana kala partisipasi ormas Islam arus utama mengalami stagnasi dalam upaya membangun kehidupan demokrasi Indonesia.¹⁹ Stagnasi masyarakat sipil, menurut Azyumardi Azra dapat meruntuhkan bangunan demokrasi Indonesia.²⁰

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa partisipasi politik masyarakat tidak hanya tidak sekedar penyaluran hak pilih mereka dalam Pemilu. Akan tetapi, peran serta masyarakat, seperti memberikan alternatif kebijakan, dalam kehidupan berdemokrasi adalah bagian dari partisipasi itu sendiri. Di Indonesia, sejak sebelum era kemerdekaan, umat Islam terlibat aktif dalam partisipasi politik. Hal ini ditandai misalnya dengan munculnya ormas-ormas Islam, yang meski berorientasi pada kegiatan sosial keagamaan, namun perannya terhadap negara tidak bisa dikesampingkan. Dua ormas Islam, NU dan Muhammadiyah memberikan model dan gambaran partisipasi mereka dalam pembangunan demokrasi Indonesia.

NU memberikan pelajaran penting bagi partisipasi politik masyarakat. Didirikan oleh para Kyai pada 31 Januari 1926 di Surabaya, NU menjadi “rumah baru umat” Islam yang memfokuskan diri pada kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan. Tujuan NU adalah terciptanya *mashlahat* (kebaikan) di Indonesia: terwujudnya keadilan dan kesejahteraan.²¹ Menurut Salahuddin Wahid, NU sangat menekankan terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang ideal melalui empat prinsip: moderasi kehidupan beragama, toleransi terhadap perbedaan, keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, serta mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran.²²

Jejak keterlibatan NU dalam politik praktis memiliki akar yang cukup panjang dan

¹⁸ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 271.

¹⁹ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, Penerjemah: Ahmad Baso (Yogyakarta: ISAI dan LKiS, 2001), 359.

²⁰ Azyumardi Azra, “Stagnasi Masyarakat Sipil” dalam Analisis Politik, *Kompas*, 5 Maret 2020, 1 dan 15.

²¹ AD ART Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dalam: Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lembaga Ta’lif wa Nasyr, PBNU, 2016), 25.

²² Salahuddin Wahid, “Refleksi 94 Tahun NU”, Opini dalam *Kompas*, 27 Januari 2020, 7.

kompleks. Sejak era orde lama, NU menjadi menyokong Partai Masyumi. Kemudian setelah terjadi konflik internal antara kelompok NU dengan unsur lain di Partai Masyumi, Muhammadiyah, PSII dan lainnya, NU kemudian memisahkan diri. NU kemudian menjadi partai politik tersendiri pada 1952 dan mengikuti Pemilu perdana pada 1955. Pada perkembangan selanjutnya, NU menyatakan kembali ke *khittah* pada 1984, tetapi bukan berarti NU lari dari arena politik. Hal ini misalnya terbukti dikemudian hari pascareformasi, NU mendirikan Partai kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1999.²³ Abdurrahman Wahid, Ketum PBNU saat itu bahkan menyebut “warga NU yang seolah-olah sakit kalau tidak berpolitik”, yang menjadi dasar pendirian PKB.²⁴ Pernyataan Abdurrahman di atas menandakan bahwa politik seolah menjadi candu bagi warga NU. Hal itu pula yang menyebabkan beberapa Kyai senior NU berpandangan bahwa NU tetap harus berperan dalam perpolitikan Indonesia.

Pada tahun 1989 NU mengeluarkan pedoman berpolitik bagi warganya. Bagi NU, berpolitik adalah keterlibatan partisipasi warganya dalam kehidupan berbangsa berdasarkan Pancasila. Dalam pedoman tersebut, NU sangat menekankan agar politik yang dijalankan warganya menjunjung tinggi nilai demokrasi yang berdasarkan konstitusi.²⁵

Dalam berpolitik, NU sangat mengedepankan konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. Melalui konsep itu, NU berpendapat

bahwa turut serta dalam partisipasi politik adalah hal yang penting demi mewujudkan konsep itu. Hal itulah yang seolah menjadi doktrin bahwa kader-warga NU harus *melek* politik; menduduki jabatan eksekutif-legislatif; serta berperan dalam jabatan penting di masyarakat.²⁶

Contoh kedua dari model partisipasi politik umat adalah *best practice* yang dilakukan Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang memiliki peran penting dalam proses partisipasi masyarakat yang tidak hanya terlibat dalam proses bernegara tapi terlibat aktif dalam proses pembentukan sebuah negara bangsa Indonesia. Menurut Alfan Alfian sejak awal kelahirannya pada tahun 1912, Muhammadiyah lebih kental dengan gerakan kultural, sosial-keagamaan bukan sebagai gerakan yang lahir dengan watak politis. Terkait keterlibatan KH. Dahlan dalam gerakan politik Sarikat Islam (SI, 1913) adalah semata-mata untuk melindungi eksistensi Muhammadiyah yang baru didirikannya. Apa yang dilakukan KH. Dahlan menurut Alfan adalah partisipasi politik sebagai upaya proteksi dengan tidak membenturkan Muhammadiyah dengan SI pada masa itu. Hal ini menjadi salah satu faktor penting berkembangnya Muhammadiyah menjadi besar tanpa harus berbenturan dengan urusan-urusan politik praktis.²⁷

Namun sebagai sebuah perkumpulan dengan gerakan kultural yang cukup masif, dan

²³ Suadi Asyari, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 132.

²⁴ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), 109.

²⁵ Abdul Mun'im, *Piagam Perjuangan Kebangsaan* (Jakarta: Setjend PB NU, 2011), 116.

²⁶ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, terj. Farid Wajdi dan Mulni Adelina (Yogyakarta: LKiS, 2003), 71.

²⁷ M. Alfan Alfian M, “Muhammadiyah, Pergulatan Wacana, dan Pergeseran Konstelasi Politik Pasca Orde Baru”, dalam Abd. Rohim Gozali, dkk, (editor), *Muhammadiyah Progresif, Manifesto Pemikiran Kaum Muda* (Jakarta: JIMM-LESFI, 2007), 625-626.

jaringan gerakan yang sudah luas, Muhammadiyah tidak bisa terlepas dari persoalan politik yang memang menjadi bagian penting dalam persoalan gerakan. Menurut Suwarno, dalam proses sejarah terjadi pergerakan orientasi politik Muhammadiyah. Periode 1912-1937 disebutnya sebagai orientasi religius-kultural. Orientasi ini kemudian bergeser menjadi politis pada tahun 1937-1971, bergeser lagi menjadi berorientasi sosial-kultural pada tahun 1971-1995, selanjutnya berorientasi politis-kultural pada tahun 1995-1998.²⁸

Peletak awal dasar partisipasi politik Muhammadiyah di panggung nasional adalah KH. Mas Mansur saat menjadi ketua umum pada 1937-1942.²⁹ Pada periode 1950, Muhammadiyah semakin intensif menjalin kedekatan dengan parpol, dan menjadi penyokong utama suara Partai Masyumi. Zuly Qodir bahkan menyebut jika Muhammadiyah punya hak istimewa di dalam Masyumi. Keistimewaan tersebut membuat Muhammadiyah semakin terlibat politik praktis dalam parpol dan itu merupakan “kecelakaan sejarah”. Untungnya, menurut Zuly, Muhammadiyah segera menyadari kesalahan itu.³⁰

Dalam perkembangannya, terobosan politik Muhammadiyah dilakukan oleh Amien Rais saat ia menjadi ketua umum. Ia

menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam politik demi terwujudnya sistem pemerintahan yang demokratis. Menurut Amien, dibanding sistem pemerintahan yang lain, demokrasi adalah lebih baik. Oleh karena itu, sebelum reformasi 1998, Amien termasuk tokoh yang lantang mendesak pelaksanaan Pemilu langsung. Konsistensinya terhadap pembangunan politik kemudian disalurkan melalui pendirian Partai Amanat Nasional (PAN) bersama koleganya. Karena Amien saat itu menjadi ketua umum Muhammadiyah lalu mendirikan PAN, maka warga Muhammadiyah pun “terseret” dalam pusaran politik praktis kepartaian.³¹

Dalam kehidupan politik, Muhammadiyah telah menerbitkan ketetapan yang kemudian disebut dengan *Khittah Denpasar 2002*. Di dalamnya terkandung seruan Muhammadiyah kepada warga dalam menyikapi kehidupan politik nasional. Pada butir kelima *khittah* itu, Muhammadiyah menegaskan jika persyarikatan itu ingin memainkan peran politik *amar ma'ruf nahi munkar* melalui intervensi kebijakan yang akan dilaksanakan pemerintah. Muhammadiyah juga menyerukan anggotanya untuk menerapkan politik yang berkeadaban, dan tidak semata-mata menguntungkan seorang atau kelompok tertentu.³²

²⁸ M. Alfian Alfian M, “Muhammadiyah, Pergulatan Wacana, dan Pergeseran Konstelasi Politik Pasca Orde Baru”, dalam Abd. Rohim Gozali, dkk, (editor), *Muhammadiyah Progresif, Manifesto Pemikiran Kaum Muda* (Jakarta: JIMM-LESFI, 2007), h. 628. Lihat juga dalam: Suwarno, *Muhammadiyah sebagai Oposisi, Studi tentang Perubahan Prilaku Politik Muhammadiyah Periode 1995-1998* (Yogyakarta: UII Press, 2001).

²⁹ Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan* (Jakarta: kencana, 2016), 69.

³⁰ Zuly Qodir, *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), 133.

³¹ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 71. Lihat juga dalam: Zuly Qodir, *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*, 148.

³² Haedar Nashir, Pengantar, “Prolog: Agama, Muhammadiyah, dan Politik Kebangsaan”, dalam Ridho Al-Hamdi, dkk, (editor), *Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam untuk*

Menurut Din Syamsuddin dalam kancah politik nasional, Muhammadiyah dihadapkan pada sebuah dilema berpolitik. Ia menilai banyak kader Muhammadiyah yang terjun ke parpol tetapi tidak ada yang memainkan peran penentu. Hal ini menyebabkan kader Muhammadiyah hanya sedikit saja yang masuk dalam kabinet (menteri). Atau, jika ada, hal itu disebabkan bukan karena yang bersangkutan adalah rekomendasi Muhammadiyah, tetapi lebih kepada adanya hubungan kedekatan kader Muhammadiyah dengan elit parpol.³³

NU dan Muhammadiyah menyadari bahwa partisipasi politik, meminjam istilah Saiful Mujani, adalah “jantungnya demokrasi”.³⁴ Keduanya menjadi pengawal jalannya demokratisasi di Indonesia sejak terbentuknya republik ini hingga pascareformasi. NU dan Muhammadiyah telah mampu menempatkan kader-kadernya sebagai anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif. Melalui kader mereka itu, NU dan Muhammadiyah memainkan peran partisipasi politik lebih besar dan bermakna. Dengan demikian, keduanya bisa dikategorikan dalam kelompok asosiasional dalam menjalankan partisipasi politik.

Sekilas Kisah Lahir Aksi Massa 212

Pada 27 September 2016, Basuki Tjahaja Purnama (akrab dipanggil Ahok) yang saat itu menjabat Gubernur Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Seribu. Di sana, ia menemui warganya dan membicarakan program Pemerintah Jakarta.

Indonesia Berkemajuan (Yogyakarta: UMY Press, 2019), 7.

³³ Tim Penyusun, *Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan Yang Bermakna* (Jakarta: PP Muhammadiyah, 2015), 13 dan 31.

³⁴ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat*, 253.

³⁵ “Pidato di Kepulauan Seribu dan hari-hari hingga Ahok menjadi tersangka”,

Dalam pidatonya, ia sempat menyinggung pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan pada 2017. Di situlah ia sempat berucap: “*Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu*”.³⁵

Pada 6 Oktober 2016, pidatonya tersebar di media sosial melalui unggahan Buni Yani dalam akun *facebooknya* dan dibubuhi judul: Penistaan Terhadap Agama? Pidato itu kemudian menuai polemik karena dianggap menistakan al-Qur’an dan ulama yang menyampaikan al-Qur’an, terutama pada kalimatnya: *nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu*. Pada tanggal 10 Oktober, Basuki segera meminta maaf kepada umat Islam dan menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menistakan al-Qur’an dan Islam. “Saya tidak berniat melecehkan ayat suci al-Qur’an, tetapi saya tidak suka memolitisasi ayat-ayat suci, baik itu al-Qur’an, al-Kitab, maupun kitab lainnya”.³⁶

Dalam beberapa kali kesempatan, Basuki menyampaikan bahwa ia tidak bermaksud menistakan Islam dan al-Qur’an. Basuki bermaksud berkata seperti dalam pidatonya karena berdasarkan pengalaman ketika ada seorang perempuan ingin sekali memilihnya tetapi ia tidak bisa memilihnya karena berbeda agama.³⁷ Umat Islam terlanjur

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>, diakses pada 17/10/2019, pukul 11.53 wib.

³⁶ Mark Woodward-Amanah Nurish, “Quo Vadis FPI Dalam Aksi Bela Islam”, dalam *Jurnal Maarif*, Vol. 11, No. 2 Desember 2016, 107.

³⁷ Humprey R. Djemat-Triana Dewi Seroja, *Kedudukan Pendapat Sikap Keagamaan MUI Dalam Hukum Positif di Indonesia*, tanpa penerbit, tanpa tahun.

marah dan tidak mampu membendung kekesalan mereka terhadap Basuki. Para perwakilan tokoh-tokoh Islam kemudian mengadakan pertemuan di Kantor MUI pada 11 Oktober 2016 untuk membicarakan masalah penistaan yang dilakukan Basuki serta polemik yang terjadi. Menyikapi polemik yang berkembang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada saat itu juga langsung mengeluarkan sikap dan pendapat keagamaannya merespons ucapan Basuki.³⁸

(1). Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin. (2). Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib. (3). Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. (4). Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. (5). Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

MUI juga memberikan rekomendasi sebagai berikut:

(1). Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2). Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut. (3). Aparat

penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4). Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum. (5). Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.³⁹

Mengenai sikap dan pendapat keagamaan MUI tersebut, Nur Ichwan yang merupakan dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menganggap bahwa terdapat kepentingan politik di dalam MUI. Hal tersebut dapat dilihat dari kejanggalan keterangan yang disampaikan Ma'ruf Amin dalam persidangan yang menyebut bahwa sikap dan pandangan keagamaan itu telah dikaji sejak tanggal 1 hingga 11 Oktober. Padahal, menurut Nur Ichwan, video Basuki baru diunggah oleh Buni Yani di media sosial pada tanggal 6 Oktober. Selain itu, Nur Ichwan juga melihat adanya kejanggalan mengenai sikap dan pandangan keagamaan karena diletakkan di atas sebuah fatwa MUI. Apalagi Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menyebut jika sikap dan pendapat tersebut derajatnya melebihi suatu fatwa.⁴⁰ Sikap dan pendapat keagamaan MUI juga

Dokumen ini diunduh dari *website* resmi Humphrey R. Djemat:

http://www.humphreydjemat.com/digital/buku_ahok_tentang_fatwa_mui.pdf.

³⁸ Much Nur Ichwan, "MUI, Gerakan Islamis dan Umat Mengambang", *Jurnal Maarif*, Vol. 11, No. 2 Desember 2016, 94.

³⁹Dokumen Pribadi tentang "Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI)". Pendapat

tersebut juga dapat diakses pada *website* resmi MUI: <https://mui.or.id/berita/10590/pendapat-dan-sikap-keagamaan-mui-terkait-pernyataan-basuki-tjahaja-purnama/>.

⁴⁰Much Nur Ichwan, "MUI, Gerakan Islamis dan Umat Mengambang", dalam *Jurnal Maarif*, Vol. 11, No. 2 Desember 2016, h. 97

mendapat kritik dari tokoh senior Muhammadiyah, Syafii Maarif. Seperti dikutip Fiqh Vredian, ia menyebut penerbitan sikap dan pendapat tersebut tergesa-gesa dan tidak dengan teliti melihat pidato Basuki. Dengan bahasa yang lebih keras, Syafii bahkan menyebut “hanya otak sakit saja yang berkesimpulan pidato Ahok menistakan al-Qur’an”.⁴¹

Setelah keluar sikap dan pendapat keagamaan MUI tersebut, para tokoh Islam yang dimotori Rizieq Syihab, Bactiar Natsir, Zaitun Rasmin dan lainnya membentuk sebuah gerakan: Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI). Dilihat dari nama gerakan tersebut, seharusnya bukan GNPF MUI, tetapi GNPSPK MUI (Gerakan Nasional Pengawal Sikap dan Pendapat Keagamaan MUI).

Perkumpulan yang mengatasnamakan GNPF MUI yang terdiri dari berbagai tokoh Islam dari lintas ormas Islam ini memiliki sikap dan tafsir sendiri atas pernyataan yang terdapat pada video yang menjadi polemik tersebut. GNPF MUI menafsirkan dua hal atas apa yang disampaikan Basuki. Tafsir pertama, GNPF-MUI menyatakan bahwa Basuki telah menghina ulama (pemimpin kaum Muslim) karena kalimatnya itu mengindikasikan pesan seorang ulama itu adalah “orang yang suka berbohong (penipu).” Tafsir kedua, GNPF-MUI menyatakan bahwa Basuki telah menistakan al-Qur’an khususnya surat Al-Maidah ayat 51, dengan menyebut ayat itu untuk menipu umat. Padahal, ayat dan seluruh isi al-Qur’an adalah kitab Allah.

Karena dua penafsiran itulah GNPF MUI menganggap Basuki telah menistakan Ulama, al-Qur’an, dan Agama Islam. Dan berdasarkan

dua tafsir itulah GNPF MUI melalui tokoh-tokoh Islam yang tergabung dalam perkumpulan tersebut menyerukan agar seluruh umat Islam berkumpul, menggelar aksi masa demi untuk membela Ulama, Al-Quran dan Agama Islam.

Terlepas dari berbagai polemik, ucapan Basuki di atas membuat marah jutaan umat Islam Indonesia. Mereka merasa kitab sucinya dilecehkan. Hal itulah yang kemudian melahirkan berbagai aksi massa menuntut agar Basuki segera diproses hukum dan di penjara. Terhadap penistaan yang dituduhkan terhadap Basuki itu, terdapat gelombang aksi massa: Aksi Bela Islam I pada 14 Oktober 2016, Aksi Bela Islam II pada 4 November 2016, dan Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016. Dari ketiga aksi tersebut, barangkali aksi 2 Desember adalah yang terbesar. Ada yang berpendapat bahwa aksi “super damai” itu diikuti 7 juta peserta.⁴²

Setelah aksi 2 Desember 2016, banyak dari peserta aksi yang tergabung dalam aliansi kelompok Islam. Mereka menamakan diri mereka sebagai Persaudaraan Alumni 212 (PA 212). Setelah Basuki dinyatakan bersalah di pengadilan dan dihukum penjara selama 2 tahun, aliansi baru tersebut tetap melakukan aksi-aksi massa, seperti Munajat 212, Mujahid 212, dan aksi massa 212 berantas mega korupsi. Tidak hanya aksi, aliansi PA 212 juga memupuk solidaritas Muslim baru. Hal ini dapat dilihat misalnya dari gelaran Reuni 212 yang rutin digelar setiap tahunnya dengan dikemas acara peringatan hari lahir Nabi Muhammad, mulai dari tahun 2017 hingga 2020. Tidak menutup kemungkinan Reuni 212 akan digelar di tahun-tahun selanjutnya.

⁴¹Fiqh Vredian Aulia Ali, “Keadilan Semu Penodaan Agama: Aksi Bela Islam, Ruang Publik dan Dilema Negara Hukum Demokratis”, dalam *Jurnal Maarif*, Vol. 11, No. 2 Desember 2016, h. 75

⁴² Raden Ridwan Hasan Saputra, “Menghitung Jumlah Peserta Aksi 212”, Opini dalam *Republika*, 5 Desember 2016, h. 6

Dampak dari Aksi Massa 212

Aksi massa 212 memberi beragam dampak terhadap kehidupan keagamaan dan kebangsaan. Sebagai sebuah aksi yang berjalan dengan damai, aksi massa 212 diklaim sebagai keberhasilan demokrasi Indonesia –terutama yang dilakukan umat Islam. Namun, sebagian lain beranggapan bahwa aksi damai itu hanya sebuah “kepalsuan” karena terdapat beberapa aktor-aktor utama pendukung aksi terafiliasi dengan gerakan islamisme, yaitu ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara, dengan menerapkan syariat Islam atau, mendirikan khilafah Islamiyah Indonesia. Di bawah ini, penulis mengulas dampak dari aksi bela Islam, seperti: kekalahan Basuki karena dianggap sebagai musuh bersama, bahkan oleh beberapa pihak, ia dibenci hingga sepanjang masa; aliansi massa 212 dalam politik praktis; tantangan kehidupan beragama pasca aksi; munculnya keinginan yang ingin mengganti sistem demokrasi menjadi khilafah dan penerapan syariah Islam di Indonesia.

1. Basuki “Musuh Bersama” Pilkada 2017 dan “Dibenci Selamanya”

Pernyataan Basuki yang mencatut surah Al-Maidah ayat 51 jelang Pilgub Jakarta benar-benar menjadi senjata “makan tuan”. Pernyataan itu pun –dianggap banyak orang– yang membuatnya kalah pada Pilgub 2017. Sempat unggul pada putaran pertama, ia akhirnya menyerah di putaran kedua. Pidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 seolah menjadi mimpi buruk bagi Basuki. Pasalnya, setelah cuplikan video itu tersebar luas, berbagai kelompok melaporkan Basuki atas dugaan penistaan agama Islam.

Permintaan maaf Basuki tidak digubris umat Islam, meski ada kelompok Muslim yang memaafkan Basuki dan menyerahkan masalah itu pada penegak hukum. Namun, jutaan orang

terlanjur “ngamuk” besar kepada Basuki. Kemarahan umat Islam terhadap Basuki seperti menemukan momentumnya karena sebetulnya, banyak pihak yang tidak suka terhadap cara komunikasi Basuki, kepemimpinannya yang dikenal “kasar”, sikapnya yang pemaarah, serta berbagai kebijakan penggusuran pemukiman warga yang dianggap ilegal. Aksi massa beberapa kali itu merupakan akumulasi kekesalan dan sekaligus kebencian kepada Basuki, ditambah lagi, Basuki yang beretnis Tionghoa (Cina).

Berbagai aksi yang terjadi tentu mengacaukan rencana Basuki dalam Pilgub Jakarta. Berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat, keduanya merupakan petahana yang memiliki modal cukup memadai. Didukung mayoritas partai di DPRD Jakarta (PDI-P, Golkar, Nasdem dan Hanura) Basuki cukup percaya diri menatap Pilgub. Terlebih, Basuki kerap diunggulkan berbagai survei lembaga survei. Pilgub Jakarta diikuti tiga pasangan calon. Pertama, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni diusung Partai Demokrat, PPP, PKB, PAN. Kedua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat diusung PDI-P, Golkar, Nasdem dan Hanura. Ketiga, Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno diusung Partai Gerindra dan PKS.

Dihadapkan pada berbagai tuntutan massa, sebetulnya elektabilitas Basuki-Djarot tetap tinggi, meski mengalami stagnasi dan cenderung sedikit penurunan. Di penghujung akhir tahun 2016, pasangan Basuki-Djarot mendapat tekanan yang begitu besar. Pada masa kampanye, keduanya sering mengalami penolakan dari warga yang didatangi. Bahkan, yang lebih menyedihkan ketika Djarot melakukan salat Jumat di sebuah masjid,

setelah melaksanakan salat, ia diusir jamaah.⁴³ Tidak berlebihan jika aksi massa 212 ini bertujuan menggagalkan Basuki dalam kontestasi Pilgub.⁴⁴

Meski menjelang pemungutan suara Basuki banyak dikecam publik Jakarta, tetapi pada putaran pertama Pilgub yang digelar pada 15 Februari 2017, ia mampu mengungguli dua pasangan lainnya. Perolehan suara Pilgub putaran pertama: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni mendapat 937.955 suara; Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mendapat 2.364.577; dan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno mendapat 2.197.333.⁴⁵ Dengan hasil tersebut di atas, tidak ada satu paslon yang suaranya melebihi 50 persen plus 1, maka diadakan putaran kedua yang dilaksanakan pada 19 April 2019. Perolehan suara pada putaran kedua adalah: Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mendapat 2.350.366 suara dan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno mendapat 3.240.987 suara.⁴⁶ Ada yang mengejutkan di pemilihan putaran pertama dan kedua, yaitu: Basuki mampu mengalahkan rivalnya di daerah markas FPI, di Petamburan.

⁴³“Teriakan ‘Usir dan Pergi’ Menggema Usai Djarot Salat Jumat di Tebet”, <https://news.detik.com/berita/d-3474648/teriakan-usir-dan-pergi-menggema-usai-djarot-salat-jumat-di-tebet>, diakses pada 28/11/2019 pukul 17.47 wib

⁴⁴Mohammad Iqbal Ahnaf, “Aksi Bela Islam, Akankah Mengubah Lanskap Muslim Indonesia?”, dalam *Jurnal Maarif*, Vol. 11, No. 2 Desember 2016, h. 34

⁴⁵ Dokumen Pribadi, “*Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017*”, KPU Provinsi DKI Jakarta 2017.

⁴⁶Dokumen Pribadi, “*Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2017-2022 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017*”, KPU Provinsi DKI Jakarta 2017.

Dikutip dari halaman berita *jawapos.com*, massa di TPS tersebut tampak kecewa dengan hasil itu.⁴⁷

Aksi bela Islam telah secara nyata mampu meminjam istilah Rizieq, “melengserkan dan melongsorkan” Basuki dari Gubernur Jakarta. Beberapa aksi dan propaganda melalui media sosial telah menyulutkan sikap benci dan anti terhadap Basuki yang beretnis Cina itu. Kebencian terhadap Basuki sekaligus memicu kebencian terhadap Cina. Aksi massa 212 yang merupakan akumulasi kekesalan warga Jakarta memang cukup berdampak signifikan pada penurunan elektabilitas Basuki. Misalnya saja, di daerah yang mengalami pengusuran era Basuki, suaranya turun drastis.⁴⁸

Meski Basuki menjalani hukuman dan telah bebas, banyak alumni 212 masih menyimpan kebencian kepadanya. Setelah presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin melantik kabinet, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thorir berencana mengangkat Basuki menjadi Komisaris PT. Pertamina. Banyak di kalangan alumni 212 yang memprotes rencana Erick tersebut.⁴⁹ Akan

⁴⁷“Sah! Dua Kali Ahok-Djarot Menang di Markas FPI”, <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/19/04/2017/sah-dua-kali-ahok-djarot-menang-di-markas-fpi/>.

Lihat juga: “Ahok Menang di Markas FPI, Netizen: Mungkin Saking Bencinya Lalu Coblos Muka Ahok”, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/02/15/ahok-menang-di-markas-fpi-netizen-mungkin-saking-bencinya-lalu-coblos-muka-ahok>, diakses pada 20/1/2020, pukul 16.16 wib.

⁴⁸“Ahok Kalah Telak di Lokasi Korban Gusuran”, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/02/16/ahok-kalah-telak-di-lokasi-korban-gusuran?page=all>, diakses pada 20/1/2020, pukul 15.27 wib.

⁴⁹“PA 212 Buat Gerakan Tolak Ahok Masuk BUMN asal Dimintai Bantuan”, <https://nasional.tempo.co/read/1273085/pa-212buat-gerakan-tolak-ahok-masuk-bumn-asal-dimintai-bantuan>, diakses pada 25/11/2019, pukul 11.48 wib.

tetapi, protes itu tidak membuat Erick mengurungkan niatnya. Ia pun tetap menunjuk Basuki sebagai Komisaris PT. Pertamina. Basuki pun diingatkan banyak pihak untuk memperbaiki cara komunikasinya agar “tergelincir lidah” menjelang Pilgub Jakarta 2017 lalu tidak terulang.⁵⁰

Tidak dapat dipungkiri, kebencian terhadap Basuki oleh beberapa orang alumni 212 memang sulit dihilangkan. Ada beribu alasan yang membuat mereka begitu membenci Basuki. Bahkan, Najib menggunakan ungkapan “Kebencian terhadap Ahok (Basuki) ini sedemikian dalamnya yang seandainya ia dihukum 400 tahun pun bisa jadi masyarakat masih belum merasa puas”.⁵¹ Akan tetapi tidak semua simpatisan massa 212 membenci seolah tak berkesudahan terhadap Basuki. Salah satunya adalah Endang Ruhiat, seorang peserta reuni 212 pada tahun 2018. Ia mengaku sudah memaafkan Basuki atas kesalahannya yang menyulut kemarahan umat Islam. Ia juga tidak mempersoalkan jabatan Basuki yang kini menjadi Komisaris Utama PT. Pertamina.⁵²

2. Persaudaraan Alumni 212 dan Politik Praktis

Munculnya aksi massa 212 memang tidak lepas dari situasi politik: Pilgub Jakarta 2017, Pilkada 2018 hingga Pemilu 2019. Memang banyak yang menganggap bahwa aksi 212 murni demi membela al-Qur'an yang

dinistakan Basuki. Hal ini misalnya merujuk pada pernyataan para peserta aksi, dan mereka yang datang dari berbagai daerah luar Jakarta sehingga tidak ada kaitan langsung dengan Pilgub Jakarta.⁵³ Akan tetapi, tak dipungkiri bahwa label 212 menjadi identitas baru yang menarik, termasuk bagi mereka yang memiliki *sahwat* politik.

Ketertarikan mereka dalam politik praktis misalnya terlihat dari oknum alumni 212 yang menggagas pendirian parpol. Pada 17 Juli 2017 di Menteng Jakarta Pusat, Siti Asmah Ratu Agung bersama alumni 212 lainnya menggagas pendirian Partai Syariah. Ma'ruf Halimuddin yang turut menggagas Partai Syariah menyebut bahwa kondisi perwakilan (parlemen) masih jauh dari kata ideal. Mereka mendirikan Partai Syariah memiliki tujuan untuk “membersihkan” parlemen. Penggagas Partai Syariah ini juga didasari kurang optimalnya peran ormas Islam dalam membangun umat. Berkenaan dengan sifat partai, Partai Syariah merupakan partai tertutup karena hanya membatasi keanggotaannya pada pemeluk Islam. Menurut Ma'ruf syarat utama untuk menjadi anggota Partai Syariah adalah beragama Islam. Pihaknya mengklaim telah mendapat dukungan dari seluruh alumni 212 se-Indonesia. Rencananya, ketua umum partai akan dipilih berdasarkan masukan dari GNPF

⁵⁰“Urus Minyak, Semoga Ahok Tak Main Api”, dalam *Rakyat Merdeka*, 25 November 2019, h. 1 dan 9

⁵¹Najib Burhani, “Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan”, dalam *Jurnal Maarif*, Vol. 11, No. 2 Desember 2016, h. 24

⁵² Wawancara tertulis dengan Endang Ruhiat, Peserta Reuni 212 Tahun 2018, 15 Januari 2020

⁵³ Berbagai peserta hadir memberikan kesaksian mereka: membela agamanya. Puluhan santri dari Ciamis rela berjalan kaki menuju Jakarta. Salah satu santri, bernama Mira mengaku hadir ke Jakarta dalam rangka

membela al-Qur'an. Sama seperti Mira, peserta dari Kuningan bernama Nining yang berusia 51 tahun juga mengaku hadir ikut aksi sebagai bentuk membela agama. Ia merasa terpanggil setelah melihat pemberitaan diberbagai media tentang aksi 212. Ramadhan Asad, peserta dari Semarang juga mengungkapkan kehadirannya sebagai peserta aksi adalah murni karena keinginan membela agamanya yang telah dinistakan Basuki. Lihat dalam: “Kami Datang ke Sini untuk Membela Al-Qur'an”, dalam *Republika*, 3 Desember 2016, h. 4

MUI dengan syarat menguasai ilmu keislaman.⁵⁴

Sebagai sebuah ekspresi kebebasan berserikat, rencana pendirian Partai Syariah adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Mereka setidaknya mempunyai ikhtiar partisipasi dalam politik. Meskipun dalam perkembangannya, Partai Syariah seperti layu sebelum berkembang. Pasca penggegasannya, tidak pernah terdengar lagi keberadaannya di momentum politik seperti Pilkada dan Pemilu.

Selain wacana pendirian partai, Persaudaraan Alumni 212 (selanjutnya disingkat PA 212) juga berkomitmen mendukung parpol tertentu dalam Pemilu 2019, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN). Dukungan terhadap PAN bahkan dideklarasikan secara resmi pada 20 Februari 2019 di Kantor DPP PAN di Jakarta. Dari pihak PA 212 hadir para petinggi mereka seperti Ketum PA 212 Slamet Ma'arif, Sekjen PA 212 Bernard Abdul Jabbar. Turut hadir pula Ketua GNPF-Ulama Yusuf Martak. Sedangkan elite PAN yang hadir antara lain Ketum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen Eddy Soeparno, dan Ketua DPP PAN Yandri Susanto. Menurut Slamet, alasan PA 212 mendukung PAN pada Pemilu dikarenakan beberapa sebab seperti: PAN adalah parpol berbasis Islam yang peduli terhadap umat dan banyak anggota PA 212 yang menjadi caleg dari PAN.⁵⁵

Dukungan PA 212 kepada PAN menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, jika PA

212 berniat mendukung parpol Islam, mengapa mereka tidak mendukung PKS yang dengan jelas mencantumkan "Islam" sebagai asas parpol? Meskipun mendapat dukungan dari PA 212, ternyata PAN tidak meraih hasil positif dalam Pemilu. Perolehan suara PAN secara nasional cenderung stagnan. Jika pada Pemilu 2014 lalu PAN memperoleh sebanyak 9.481.621 suara, pada Pemilu 2019 PAN hanya mengalami kenaikan menjadi sebanyak 9.572.623 suara. Meski mengalami sedikit kenaikan, kursi PAN di DPR RI justru mengalami penurunan dari 49 kursi pada Pemilu 2014, menjadi 44 kursi Pemilu 2019. Fenomena dukungan PA 212 kepada PAN tidak menjamin peningkatan signifikan terhadap perolehan suara.

Setelah Kongres PAN di Kendari pada Februari 2020, kubu Amin Rais mulai tersingkir dalam susunan kepengurusan PAN yang baru. Beberapa loyalis Amin pun merencanakan membentuk partai baru dengan segmen pemilih peserta aksi massa 212. Menurut Agung Mozin, politisi senior PAN, partai baru nanti dimaksudkan sebagai oposisi pemerintahan Joko Widodo.⁵⁶

Sementara itu, dalam hal pilihan presiden, PA 212 mayoritas mendukung Prabowo-Sandiaga pada Pemilu 2019 lalu. Hal ini juga bisa terbaca dari rangkaian acara Ijtima Ulama yang di dalamnya pesertanya adalah unsur 212, mereka secara terbuka mendukung Prabowo-Sandiaga.⁵⁷ Demikian yang terjadi pada acara Munajat 212, di mana

⁵⁴"Tujuh Alumni Aksi 212 Mendeklarasikan Partai Syariah, Visinya?", <https://nasional.tempo.co/read/892053/tujuh-alumni-aksi-212-mendeklarasikan-partai-syariah-visinya>, diakses pada 17/12/2019 pukul 14.04 wib.

⁵⁵"Ingin Partai Basis Islam Besar, PA 212 Dukung PAN di Pemilu 2019", <https://news.detik.com/berita/d-4436161/ingin-partai->

[basis-islam-besar-pa-212-dukung-pan-di-pemilu-2019](https://news.detik.com/berita/d-4436161/ingin-partai-basis-islam-besar-pa-212-dukung-pan-di-pemilu-2019), diakses pada 17/12/2019 pukul 14.40 wib.

⁵⁶"Bikin Partai Baru, Amien Rais akan Gandeng Alumni 212", <https://www.merdeka.com/politik/bikin-partai-baru-amien-rais-akan-gandeng-alumni-212.html>, diakses pada 8/6/2020 pukul 13.53 wib.

⁵⁷Ali Thaufan Dwi Saputra, *Pergolakan Partai Islam di Tahun Politik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), h. 122

dalam acara tersebut juga ada indikasi dukungan terhadap Prabowo-Sandiaga.⁵⁸

Keterkaitan aksi 212 dengan politik juga ditegaskan mantan advokad GNPf MUI, Kapitra Ampera. Hal tersebut dikemukakan menjelang acara reuni 212 pada tahun 2017. Menurutnya, melalui rangkaian aksi massa 212, umat Islam ingin menjadi pemegang kekuasaan melalui momentum politik seperti Pilkada dan Pemilu. Artinya, umat Islam ingin meraih kekuasaan melalui jalur yang sah secara berdasarkan hukum yang berlaku.⁵⁹

Sebagai sebuah kelompok dan aksi massa yang memiliki tujuan politik, massa 212 berhasil menggagalkan Basuki menjadi Gubernur Jakarta. Namun, tujuan politik 212 (yang terepresentasi melalui PA 212) menemui kegagalan ketika gagal memenangkan PAN dalam Pemilu 2019. Dukungan PA 212 terhadap PAN memang terkesan aneh. Pasalnya, dalam perhelatan Pilpres, mereka mendukung Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Dengan kata lain, PA 212 tidak satu suara dalam memberi dukungan antara Pileg dan Pilpres. Hal ini mungkin menyulitkan dan membingungkan massa 212 itu sendiri karena persoalan teknis dalam Pemilu kian rumit dengan multipartai ekstrem.

3. Tantangan Kehidupan Beragama Pasca Aksi 212

Munculnya aksi massa 212 memang sulit dilepaskan dari konteks politik saat itu, terlebih pelaksanaannya mendekati Pilgub Jakarta. Meski bertalian erat dengan situasi politik, pasca aksi massa juga terjadi polarisasi

kehidupan keberagamaan di Indonesia, terutama sekali di Jakarta. Di tengah rentetan aksi massa 212, di beberapa masjid di Jakarta muncul spanduk bertuliskan larangan menyalati jenazah pendukung Basuki. Kemunculan spanduk-spanduk tersebut bagi penulis sangat mengagetkan dan memprihatinkan bagi kehidupan sosial masyarakat.

Faktanya, larangan menyalati jenazah pendukung Basuki benar adanya. Kejadian ini menimpa seorang jompo bernama Hindun, yang dikenal warga sekitarnya dengan sebutan Nenek Hindun. Jenazah Nenek Hindun warga Jalan Karet Raya II, Setiabudi, Jakarta Selatan seperti diterlantarkan warga sekitar rumahnya. Putri Nenek Hindun, Neneng menjelaskan kronologi ibunya yang dimusuhi warga sekitar. Hal itu bermula ketika pencoblosan Pilgub Jakarta putaran pertama, sang ibu karena telah jompo tidak sanggup pergi ke TPS. Akhirnya petugas KPPS mendatangi rumahnya dan meminta untuk mencoblos. Nenek Hindun mencoblos Basuki, dan sejak saat itu keluarganya kerap digunjing warga sebagai pendukung penista agama hingga sebutan keluarga kafir.

Setelah wafat, Neneng merasa kesulitan mengurus jenazah karena semua anak Nenek Hindun yang berjumlah empat orang adalah perempuan. Neneng sempat meminta ustadz setempat, Ahmad Syafii agar jenazah ibunya disalatkan di Musallah. Namun, Syafii lebih memilih menyalati di rumah saja dengan alasan tidak ada orang yang turut menyalati jika jenazah dibawa ke Musallah. Karena

⁵⁸ "TKN Jokowi: Munajat 212 Bernuansa Politis!", <https://news.detik.com/berita/4439140/tnk-jokowi-munajat-212-bernuansa-politis>, diakses pada 24/10/2019. 11.53 wib. Lihat juga dalam: "Penjual Kaus Prabowo - Sandiaga di Acara Munajat 212 Merasakan Sepi Pembeli", <https://www.suara.com/news/2019/02/21/200956/penju>

al-kaus-prabowo-sandiaga-di-acara-munajat-212-merasakan-sepi-pembeli, diakses pada 24/10/2019. 11.53 wib.

⁵⁹"Dengan 212, Umat Islam Ingin Berkuasa Lewat Pilkada, Pemilu Dan Pilpres", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42184928>, diakses pada 18/12/2019 pukul 10.32 wib.

alasan itulah, Ahmad lebih memilih menyalati jenazah dan diikuti empat orang warga tetangga Nenek Hindun. Ahmad juga menyatakan jika penggali kubur sudah menelepon agar jenazah segera dibawa ke makam untuk dikuburkan.⁶⁰

Peristiwa yang menimpa jenazah Nenek Hindun mengundang keprihatinan banyak orang termasuk Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Nasaruddin meminta warga agar tidak menolak menyalati jenazah Muslim. Ia menyayangkan masalah politik memberi dampak pada ritual agama (menolak salat jenazah).⁶¹

Selain penolakan menyalati jenazah pendukung Basuki, pada Pilgub Jakarta 2017 juga terjadi pengusiran dari masjid terhadap Djarot Saiful Hidayat yang merupakan calon wakil gubernur mendampingi Basuki. Peristiwa itu terjadi di Masjid Atiq Tebet Jakarta Selatan setelah salat Jumat. Peristiwa itu disayangkan banyak pihak karena kehadiran Djarot bukan untuk kampanye, melainkan ingin beribadah laiknya umat Islam lainnya.⁶² Beberapa pihak seperti Zuhairi Misrawi (kader NU) dan Djan Faridz (mantan politisi PPP) menyayangkan kejadian itu. Selain merupakan tindakan yang tidak dibenarkan Islam, pengusiran Djarot dari

masjid juga merupakan merebaknya wabah radikalisme.⁶³

Mengutip apa yang ditulis Fathorahman, bahwa sebagian massa 212 ini memang berpotensi membuka pintu radikalisme. Mereka hadir dengan model dan *rejuvenasi* (peremajaan) gerakan radikalisme melalui aksi-aksi massa.⁶⁴ Ahmad Suaedy tak menampik jika aksi bela Islam ini ditunggangi kelompok radikal. Meski aksi massa telah berlangsung sangat damai, tetapi elemen yang terlibat dalam aksi juga terdiri dari unsur kelompok radikal yang kerap melakukan hal-hal intoleransi dan bahkan kekerasan. Aksi 212 seolah membuka lebar pintu bersemainya gerakan radikalisme agama. Meski demikian, Suaedy juga mencatat bahwa kemunculan gerakan radikalisme juga diimbangi dengan kemunculan kelompok yang terus merawat toleransi beragama di Indonesia.⁶⁵

Tantangan kehidupan beragama seperti maraknya intoleransi dan radikalisme pasca aksi 212 memang menjadi problem tersendiri. Hal ini merujuk survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Berdasarkan survei itu, masyarakat kian intoleran politik terhadap non-Muslim. Menurut Burhanuddin, aksi-aksi massa 212 juga memberikan angin segar tumbuhnya radikalisme. Meski dihantui

⁶⁰“Jenazah Nenek Hindun Ditelantarkan Warga Setelah Pilih Ahok”, <https://www.liputan6.com/news/read/2882270/jenazah-nenek-hindun-ditelantarkan-warga-setelah-pilih-ahok>, diakses pada 18/12/2019, pukul 11.44 wib.

⁶¹“Soal Tolak Salat Jenazah, Imam Masjid Istiqlal: Bisa Dosa Massal”, <https://nasional.tempo.co/read/855582/soal-tolak-salat-jenazah-imam-masjid-istiqlal-bisa-dosa-massal/full&view=ok>, diakses pada 18/12/2019, pukul 11.50 wib.

⁶²“Teriakan 'Usir dan Pergi' Menggema Usai Djarot Salat Jumat di Tebet”, <https://news.detik.com/berita/d-3474648/teriakan-usir-dan-pergi-menggema-usai-djarot-salat-jumat-di-tebet>, diakses pada 28/11/2019 pukul 17.47 wib

⁶³“Kader NU: Pengusiran Djarot dari Masjid Tak Sesuai Akhlak Islam”, <https://www.liputan6.com/pilkada/read/2920732/kader-nu-pengusiran-djarot-dari-masjid-tak-sesuai-akhlak-islam>. Lihat juga dalam: “Djarot Diusir dari Masjid, Djan Faridz: Radikalisme di Ibu Kota Semakin Nyata”, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/04/14/djarot-diusir-dari-masjid-djan-faridz-radikalisme-di-ibu-kota-semakin-nyata>, diakses pada 18/12/2019 pukul 13.19 wib

⁶⁴ Fathorahman Ghufron, “Radikalisme dan Politik Identitas”, Opini dalam *Kompas*, 5 Mei 2017, h. 7

⁶⁵ Ahmad Suaedy, “Kematian Gus Dur dan Lahirnya Habitus Baru Kebhinekaan Indonesia”, dalam *Jurnal Maarif*, Vol. 11, No. 2 Desember 2016, h. 158-164

dengan intoleransi dan bersemainya radikalisme, tetapi survei itu juga menunjukkan hal positif yaitu meningkatnya kepercayaan publik pada demokrasi.⁶⁶ Berkaitan dengan munculnya intoleransi politik, hal tersebut memang menuai polemik karena memang terdapat nash agama yang menganjurkan memilih pemimpin seiman (seagama). Meski tafsir terhadap nash tersebut juga multi-interpretasi, seperti yang terjadi dalam kasus Basuki.

Arie Setyaningrum Pamungkas dan Gita Octaviani dalam artikel berjudul *Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring* menulis bahwa ada hal yang disisakan dari aksi 212, yaitu benih kebencian atas nama agama. Benih kebencian ini kerap menjadi alat politisi yang berkepentingan meraih kekuasaan. Benih kebencian ini misalnya sentimen anti Cina, mengutuk secara berlebihan para pendukung Basuki dan mengafirkannya, hingga kampanye bahaya PKI dengan menuduh pihak tertentu sebagai PKI.⁶⁷

Sejak mencuatnya kasus penistaan yang dilakukan Basuki, kehidupan beragama mengalami banyak tantangan. Kasus Basuki, menurut Masdar Hilmy mengakibatkan masyarakat Indonesia menjadi mudah menebar hujatan, terutama terjadi di media sosial. Selain itu, hubungan antar agama kerap diliputi rasa buruk sangka. Kasus Basuki juga memunculkan kembali dikursus pribumi dan non pribumi. Masdar mengingatkan jika kondisi tersebut terus dipelihara, akan menyebabkan polarisasi yang memperparah

kehidupan sosial. Karenanya, diperlukan perpaduan yang erat antar warga masyarakat, melakukan “kohesi sosial”.⁶⁸

4. Proyek NKRI Bersyariah dan Khilafah

Kata syariah (bersyariah) dan khilafah bagi *momok* bagi sebagian masyarakat Indonesia, terlebih non-Muslim. Kata syariah kerap diasosiasikan kepada Piagam Jakarta yang pernah menjadi polemik sebelum kemerdekaan hingga pascareformasi. Kata syariah juga kerap dianggap negatif, misalnya terlihat dari adanya Perda Syariat yang dianggap mengancam kelompok tertentu. Sedangkan khilafah dianggap sebagai sistem baru pengganti demokrasi yang konsisten disuarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menjelang kemerdekaan, para tokoh bangsa yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merumuskan dasar negara, bentuk negara dan hal lain yang berkenaan dengan struktur negara. Semua pembahasan berlangsung relatif lancar kecuali pembahasan perihal dasar negara. Terjadi perdebatan sengit terhadap dasar negara: kelompok Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara, dan kelompok nasionalis mengajukan Pancasila. Saat itu, akhirnya diputuskan dalam *preamble* (pembukaan) UUD kalimat “Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang merupakan hasil kesepakatan kedua kelompok tadi. Jadilah

⁶⁶“Survei LSI: Gerakan 212 Picu Naiknya Intoleransi di Indonesia”, <https://www.voaindonesia.com/a/survei-lsi-gerakan-212-picu-naiknya-intoleransi-di-indonesia/4585895.html>, diakses pada 19/12/2019 pukul 14.00 wib

⁶⁷ Arie Setyaningrum Pamungkas dan Gita Octaviani, “Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring”, dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4 No. 2, Agustus 2017, h. 65

⁶⁸ Masdar Hilmy, “Merajut Kewargaan Kita”, dalam *Opini Kompas*, 23 Januari 2017, h. 6.

kesepakatan itu disebut sebagai Piagam Jakarta. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menggelar sidang dan semua forum menyatakan menerima klausul di atas. Namun, setelah pembacaan proklamasi, muncul penolakan atas klausul tersebut sehingga dicarilah titik temu perubahannya menjadi: Ketuhanan yang maha esa.⁶⁹

Wacana Piagam Jakarta itu terus hidup melintasi kehidupan politik Indonesia. Bahtiar mencatat bahwa pascareformasi, terjadi ledakan jumlah parpol Islam. Ada pula di antara parpol itu yang ingin menghidupkan kembali Piagam Jakarta sebagai *way of Indonesia*. Tak hanya itu, kekuatan Islam politik juga terejawantahkan dengan adanya ormas Islam yang mengusung penerapan syariat Islam secara kafah sebagai fondasi kehidupan bernegara. Tujuan mereka didasarkan pada tiga hal, pertama, Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia, sehingga sudah sepatutnya Islam menjadi pegangan dalam bernegara. Kedua, jumlah penduduk Muslim adalah yang terbesar di Indonesia sehingga wajar jika Islam dijadikan sebagai dasar Negara. Ketiga, negara Indonesia masih menganut “hukum manusia” berupa demokrasi dan terus dihadapkan dengan berbagai persoalan sosial. Oleh karenanya sudah seharusnya digantikan dengan Islam karena ia adalah *problem solver*.⁷⁰

Pada 2017 dalam reuni massa alumni 212, wacana NKRI Bersyariah kembali digaungkan oleh Rizieq. Ide NKRI Bersyariah

adalah sebuah ide yang sangat serius untuk diusung sebagai jalan baru bagi Indonesia. Rizieq menganggap bahwa bersyariah adalah pilihan yang tepat bagi Indonesia di tengah banyak masalah yang dihadapi. Ia juga bersikeras bahwa NKRI Bersyariah tidak bertentangan dengan Pancasila, justru sejalan. Dengan jalan NKRI Bersyariah, Indonesia akan bebas dari bahaya laten komunis dan paham tidak beragama (*atheis*).⁷¹

NKRI Bersyariah yang digaungkan Rizieq mendapat tanggapan dari pakar survei, Denny JA. Sebelum menggaungkan NKRI Bersyariah, Rizieq harus terlebih dahulu mematangkan “proposal NKRI Bersyariah” itu dan harus melewati ujian yang matang pula. Denny kemudian mencontohkan hasil riset *Islamicity Index* yang dipimpin oleh para pakar berbagai bidang keilmuan. Para pakar tersebut membuat indeks pengukuran masyarakat yang ideal berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an seperti: keadilan, tata kelola pemerintahan yang bersih, kesejahteraan dan hak asasi manusia.

Lembaga itu kemudian melakukan survei pada 2017 dan hasilnya menunjukkan bahwa 10 negara yang menerapkan pola hidup islami justru negara Barat yang mayoritas non-Muslim: Selandia Baru, Belanda, Swedia, Irlandia, Swiss, Denmark, Kanada dan Australia. Sementara negara-negara Muslim justru berada di urutan tengah ke bawah. Hasil riset itu setidaknya menjadi kaca perbandingan bagi negara-negara Muslim.⁷² Muhammad Irfan menyinggung bahwa sejatinya, NKRI

⁶⁹Makruf Cahyono, *Konstitusi dan MPR Dalam Dinamika Sejarah* (Jakarta: Sekjend MPR RI, 2014), h. 87

⁷⁰Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Democracy Project, 2011), h. 436.

⁷¹“‘Hadir’ di Reuni 212, Habib Rizieq Serukan NKRI Bersyariah”,

<https://www.viva.co.id/berita/metro/983604-hadir-di-reuni-212-habib-rizieq-serukan-nkri-bersyariah>, diakses pada 3/1/2020 pukul 16.16 wib.

⁷²Denny JA, “NKRI Bersyariah dan Ruang Publik yang Manusiawi”, dalam Satrio Arismunandar (editor), *Menata Kiblat Syariah di Negara Pancasila* (Tanpa Tempat: Cerah Budaya Indonesia, 2019), h. 13

telah bersyariah dengan Pancasila. Oleh sebab itu ide NKRI Bersyariah tak perlu digulirkan lagi.⁷³

Meski mengundang berbagai kritik atas ide NKRI Bersyariah, tetapi kelompok alumni 212 tetap bersikukuh mewujudkan ide Rizieq itu. Pada 5 Agustus 2019, tokoh-tokoh massa 212 menggelar ijtima ulama yang salah satu hasilnya adalah memutuskan: “*Mewujudkan NKRI BERSYARIAH yang berdasarkan PANCASILA sebagaimana termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 dengan prinsip AYAT SUCI DI ATAS AYAT KONSTITUSI agar diimplementasikan dalam kehidupan Beragama, Berbangsa, dan Bernegara*”. Demikian bunyi salah satu butir hasil ijtima ulama itu.⁷⁴

Selain ide NKRI Bersyariah, beberapa massa aksi 212 juga mewacanakan pendirian negara khilafah Islamiyah. Seperti disinggung sebelumnya bahwa rentetan aksi massa 212 rentan disusupi kelompok yang memanfaatkan aksi untuk mewacanakan ide penegakan sistem khilafah. Dalam studi politik Islam, para pengusung ide khilafah ini memang terinspirasi untuk membangun kembali kejayaan khilafah Turki Ustmani. Kerajaan ini memang hancur lebur pada 1924 setelah Kemal Attatruk mengubah arah Turki menjadi negara “sekuler”. Pada tahun 1953, Taqiyudin Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir di Palestina dan mulai mengembangkan ke beberapa negara Timur Tengah untuk membangkitkan

kembali sistem khilafah. Tetapi keberadaan Hizbut Tahrir sendiri banyak ditolak di beberapa negara.⁷⁵

Kehancuran kekhilafahan Turki menimbulkan gejolak pemikiran dan pergerakan di negara lain seperti Mesir. Setelah Kemal membubarkan kekhilafahan Turki, di sana muncul pertentangan keras antara pihak yang pro dan kontra khilafah. Pihak yang mendukung khilafah diwakili Rasyid Ridha, yang beranggapan bahwa mendirikan khilafah bagi umat Islam adalah wajib hukumnya. Sementara pihak yang menentang khilafah diwakili Ali Abd Raziq yang berargumen bahwa khilafah bukan model bernegara yang dicontohkan Nabi Muhammad. Menurut Ali, khilafah adalah satu dari sekian banyak alternatif model negara.⁷⁶ Sebagai respons atas pembubaran khilafah Turki, Hasan al-Banna kemudian mendirikan organisasi *Ikhwan al-Muslimin* (baca: Ikhwanul Muslimin yang sering disingkat IM) di Mesir. IM berpendapat bahwa ajaran Islam adalah sempurna dan karena itu patut dijadikan dasar menjalankan negara.⁷⁷ Perbedaan konsepsi tentang negara Islam atau berdasarkan pada nilai-nilai agama oleh para pemikir Muslim menunjukkan bahwa dikursus negara Islam sangat beragama, multi-interpretasi. Karenanya, wajar saja jika sistem khilafah tidak diterima dalam suatu negara tertentu.⁷⁸

⁷³Muhammadi Irfan, “Menggelorakan NKRI (yang Sudah) Bersyariah”, dalam dalam Satrio Arismunandar (editor), *Menata Kiblat Syariah di Negara Pancasila* (Tanpa Tempat: Cerah Budaya Indonesia, 2019), h. 1345-48

⁷⁴Dokumen Pribadi, Keputusan Hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional IV, Jakarta, 5 Agustus 2019.

⁷⁵Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), h. 153

⁷⁶Lutfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopi: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Freedom Institut, 2011), h. 39

⁷⁷Sidi Ritaudin, *Benturan Politik: Antara Idealisme dan Pragmatisme* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, tt), h. 46.

⁷⁸Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia*, h. 93

Para pengusung sistem khilafah meyakini bahwa dengan sistem itu, dunia akan lebih baik. Mereka mengklaim, dengan khilafah, umat manusia akan semakin sejahtera. Saat ini, sistem demokrasi hanya menguntungkan para kapitalis semata sehingga yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan tetap miskin. Selain itu, khilafah juga akan memberikan rasa aman, baik bagi umat Islam maupun non-Muslim. Khilafah juga akan tetap menjamin kehormatan perempuan dan memberikannya tempat yang istimewa. Yang paling penting, para pengusung khilafah berpendapat bahwa sistem ini adalah amanat dari al-Qur'an.⁷⁹ Di Indonesia sendiri, kampanye penegakan khilafah secara konsisten dilakukan oleh ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kelompok ini masuk ke berbagai daerah, terutama melalui kampus-kampus secara masif. Mereka mengampanyekan tentang bentuk negara di bawah pimpinan internasional dunia bernama khilafah itu.⁸⁰ Kelompok HTI ini juga selalu berargumen bahwa segala masalah sosial, politik dan ekonomi Indonesia akan teratasi dengan satu sistem: khilafah. Apa pun persoalannya, khilafah solusinya; khilafah mengatasi segala masalah.⁸¹

Bentuk negara Islam memang terus menjadi perdebatan di dalam Islam sendiri. Pakar politik Islam seperti Bahtiar Effendy menilai bahwa Islam tidak memberikan tuntunan membentuk sebuah model negara. Islam, seperti dalam al-Qur'an hanya

membicarakan tentang model masyarakat yang ideal. Dengan terbentuknya masyarakat yang dalam bahasa Nurcholish sebagai "Masyarakat Madani", maka, itulah sebetulnya substansi Islam.⁸²

Berkenaan dengan aksi massa 212, Wildan dalam tulisannya menyebut bahwa aksi 2 Desember 2016 itu memang diikuti kalangan menengah dan terdidik. Mereka pun cukup rasional sehingga tidak akan mudah mengubah pandangannya terhadap ideologi Pancasila dan komitmennya terhadap NKRI. Akan tetapi, ada sebagian kecil dari oknum peserta aksi yang menginginkan penerapan syariah dan khilafah.⁸³ Oknum peserta aksi ini yang kemudian memelihara cita-cita penegakan sistem khilafah dengan memanfaatkan aksi berlabel 212. Hal ini misalnya terlihat dalam aksi setelahnya: Mujahid 212 dan reuni 212 pada tahun 2019.

Salah seorang peserta aksi Reuni 2018 dan 2019 asal Kediri, Daryanto, meyakini jika sistem khilafah adalah kebutuhan bagi Indonesia. Di tengah banyaknya problematik umat, khilafah adalah solusinya. Daryanto berpendapat bahwa saat ini banyak intimidasi yang dialami komunitas Muslim dunia seperti masalah di Xinjiang, Rohingya dan Palestina. Oleh karenanya, umat Islam membutuhkan sistem politik yang mampu menyelesaikan problem tersebut: sistem khilafah.⁸⁴ Hal yang sama juga dikemukakan Mark Mubarak, salah seorang peserta aksi 2 Desember 2016, yang mendukung penerapan syariat Islam di

⁷⁹Farid Wajdi, "Mengapa Harus Khilafah", dalam Arief B. Iskandar (editor), *Ilusi Negara Demokrasi* (Bogor: Al-Zahar Press, 2009), h. 347

⁸⁰AE. Priyono, *Masa Depan Islam-Politik dan Islamisme di Indonesia* (Yayasan Badan Waqaf UII: Lembaga Kebudayaan Embun Kalimasada, 2019), h. 8

⁸¹Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia*, h. 101

⁸²Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, h. 215.

⁸³Muhammad Wildan, "Aksi Damai 411-212, Kesalahan Populer, dan Identitas Muslim Perkotaan Indonesia", dalam *Jurnal Maarif*, Vol. 11, No. 2 Desember 2016, h. 200

⁸⁴Wawancara dengan Daryanto, Peserta Aksi 2 Desember 2016 di Kediri dan Reuni 212 tahun 2018 dan 2019, 13 Maret 2020

Indonesia. Hal tersebut menurut Mubarak didasarkan pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga penerapan syariat itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Ia mengatakan: “Syariat Islam dalam kehidupan bernegara yes”.⁸⁵

Di dalam komposisi kelompok peserta aksi massa 212 terdapat kesamaan dan perbedaan gagasan terkait penerapan syariah dan khilafah. Wacana ini pun sebetulnya sudah muncul sejak lama di Indonesia. Bahtiar misalnya mengemukakan bahwa kelompok yang konsisten menierikan penerapan syariah Islam –seperti diwakili FPI- sebetulnya tidak begitu mementingkan bentuk negara khilafah. Yang terpenting, bagi FPI adalah tegaknya syariah, meski bukan dalam bentuk negara khilafah.⁸⁶ Sementara, HTI –meski telah dibubarkan pemerintah- yang turut menjadi elemen peserta aksi 212 mendapat tempat untuk menyampaikan ide khilafah di muka umum.

Simpulan

Berdasar pada pembahasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa aksi massa 212 tersebut lahir dari kemarahan massa terhadap pernyataan Basuki yang menistakan Al-Quran. Kemarahan dalam bentuk aksi itu juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang kecewa atas kepemimpinannya selama memimpin Jakarta. Ditinjau dari perspektif partisipasi politik, aliansi massa 212 ini telah mampu memengaruhi kebijakan pemerintah –dengan sangat menekan- untuk segera mengambil langkah hukum terhadap Basuki. Sejalan dengan yang dikemukakan Samuel, Joan, Ramlan dan Miriam, bahwa partisipasi politik masyarakat tidak hanya penyaluran hak pilih dalam Pemilu, tetapi juga aksi-aksi massa

adalah bagian dari partisipasi memengaruhi kebijakan pemerintah.

Artikel ini juga menyimpulkan bahwa deretan aksi massa 212 memberi dampak dalam kehidupan keagamaan dan kenegaraan – secara lebih spesifik politik ideologis dan praktis. Dalam konteks kehidupan keagamaan, terdapat ketegangan di masyarakat akibat perbedaan sikap terhadap kasus Basuki dan pilihan politik. Hal ini misalnya dapat dilihat dari adanya penolakan salat jenazah terhadap pendukung Basuki dan pengusiran Djarot dari masjid setelah salat Jumat. Aksi massa yang dipicu pernyataan Basuki yang merupakan seorang etnis Tiongkok dan Kristen menyebabkan munculnya gelombang baru politik identitas, yang jika terus diduplikat dalam kampanye politik Pilkada dan Pemilu akan membahayakan demokrasi dan kebangsaan Indonesia. Sepanjang masa kampanye Pilkada Jakarta 2017, dan bahkan pasca Pilkada, sering kali terjadi aksi kampanye di media sosial: seruan boikot produk Tiongkok dan bahwa kristenisasi jika Jakarta dipimpin Gubernur Kristen.

Berkenaan dengan kehidupan politik ideologis, aksi massa 212 menjadi panggung serta momentum munculnya kelompok yang selama ini menginginkan penegakan syariat Islam dan tegaknya sistem khilafah. Sedangkan dalam kaitannya dengan politik praktis, aksi massa 212 mampu menciptakan aliansi baru yang memiliki tujuan politik, memenangkan capres yang didukung, Prabowo; dan parpol yang didukung, PAN. Adanya syahwat berpolitik elite dan massa aksi 212, menjadi peluang bagi mereka untuk mendirikan partai politik baru: Partai Islam 212.

⁸⁵ Wawancara dengan Mark Mubarak, Peserta Aksi 2 Desember 2016, 13 Maret 2020

⁸⁶ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, h. 442.

Pustaka Acuan

- Abidin, Zainal Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003
- Alfian, Alfian, “Muhammadiyah, Pergulatan Wacana, dan Pergeseran Konstelasi Politik Pasca Orde Baru”, dalam Abd. Rohim Gozali, dkk, (editor), *Muhammadiyah Progresif, Manifesto Pemikiran Kaum Muda*, (Jakarta: JIMM-LESFI, 2007
- Arief B. Iskandar (editor), *Ilusi Negara Demokrasi*, Bogor: Al-Zahar Press, 2009
- Asyari, Suadi, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*, Yogyakarta: LKiS, 2009
- Assyaukanie, Lutfi, *Ideologi Islam dan Utopi: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Freedom Institut, 2011
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Burhani, Najib, “Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan”, dalam *Jurnal Maarif*, Vol. 11, No. 2 Desember 2016
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Democracy Project, 2011
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, Penerjemah Farid Wajdi dan Mulni Adelina, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Hefner, Robert W., *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, Penerjemah: Ahmad Baso, Yogyakarta: ISAI dan LKiS, 2001
- Huntington, Samuel dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Iqbal, Mohammad Ahnaf, “Aksi Bela Islam, Akankah Mengubah Lanskap Muslim Indonesia?”, dalam *Jurnal Maarif*, Vol. 11, No. 2 Desember 2016
- Jamil, Abdul Wahab, *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019
- Jurdi, Syarifuddin, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992
- Ritaudin, Sidi, *Benturan Politik: Antara Idealisme dan Pragmatisme*, Bandar Lampung: Harakindo Publishing, tanpa tahun
- Penulis, Tim, *Tausiyah Pemilu Berkah*, Jakarta: Bawaslu RI, tanpa tahun
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Dian Rakyat, 2008
- Mujani, Saiful, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Munawar, Budhi Rahman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Bandung: Mizan, 2006
- Mun'im, Abdul, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta: Setjend PB NU, 2011
- Nashir, Haedar, Pengantar, “Prolog: Agama, Muhammadiyah, dan Politik Kebangsaan”, dalam Ridho Al-Hamdi, dkk, (editor), *Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan*, Yogyakarta: UMY Press, 2019

- Penyusun, Tim, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lembaga Ta'lif wa Nasyr, PBNU, 2016
- Priyono, AE., *Masa Depan Islam-Politik dan Islamisme di Indonesia*, Yayasan Badan Waqaf UII: Lembaga Kebudayaan Embun Kalimasada, 2019
- Qodir, Zuly, *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010
- Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi, Studi tentang Perubahan Prilaku Politik Muhammadiyah Periode 1995-1998*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Thaufan, Ali Dwi Saputra, *Pergolakan Partai Islam di Tahun Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019
- Vredian, Fiqh Aulia Ali, "Keadilan Semu Penodaan Agama: Aksi Bela Islam, Ruang Publik dan Dilema Negara Hukum Demokratis", dalam *Jurnal Maarif*, Vol. 11, No. 2 Desember 2016
- Woodward, Mark -Amanah Nurish, "Quo Vadis FPI Dalam Aksi Bela Islam", dalam *Jurnal Maarif*, Vol. 11, No. 2 Desember 2016
- Wawancara tertulis dengan Endang Ruhiat, Peserta Reuni 212 Tahun 2018, 15 Januari 2020
- Wawancara dengan Daryanto, Peserta Aksi 2 Desember 2016 di Kediri dan Reuni 212 tahun 2018 dan 2019, 13 Maret 2020
- Wawancara dengan Mark Mubarak, Peserta Aksi 2 Desember 2016, 13 Maret 2020
- Surat Kabar dan Media Online**
- Azra, Azyumardi, "Stagnasi Masyarakat Sipil" dalam Analisis Politik, Kompas, 5 Maret 2020
- Ridwan, Raden Hasan Saputra, "Menghitung Jumlah Peserta Aksi 212", Opini dalam *Republika*, 5 Desember 2016
- Wahid, Salahuddin, "Refleksi 94 Tahun NU", Opini dalam *Kompas*, 27 Januari 2020
- "Pidato di Kepulauan Seribu dan hari-hari hingga Ahok menjadi tersangka", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>, diakses pada 17/10/2019, pukul 11.53 wib.
- "Teriakan 'Usir dan Pergi' Menggema Usai Djarot Salat Jumat di Tebet", <https://news.detik.com/berita/d-3474648/teriakan-usir-dan-pergi-menggema-usai-djarot-salat-jumat-di-tebet>, diakses pada 28/11/2019 pukul 17.47 wib
- "Sah! Dua Kali Ahok-Djarot Menang di Markas FPI", <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/19/04/2017/sah-dua-kali-ahok-djarot-menang-di-markas-fpi/>, diakses pada 20/1/2020, pukul 16.16 wib.
- "Jenazah Nenek Hindun Ditelantarkan Warga Setelah Pilih Ahok", <https://www.liputan6.com/news/read/2882270/jenazah-nenek-hindun-ditelantarkan-warga-setelah-pilih-ahok>, diakses pada 18/12/2019, pukul 11.44 wib.
- "Soal Tolak Salat Jenazah, Imam Masjid Istiqlal: Bisa Dosa Massal", <https://nasional.tempo.co/read/855582/s soal-tolak-salat-jenazah-imam-masjid-istiqlal-bisa-dosa-massal/full&view=ok>, diakses pada 18/12/2019, pukul 11.50 wib.